



ISSN 2685-483X

Volume 4, Issue 1, Januari-Juni 2022

Halaman 48-55



Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender

Anggaunitakiranantika ^{*a,b}

a. Departemen Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

b. Department of Women Studies, Ewha Woman's University, South Korea

Kata Kunci	Abstrak
Diskriminasi Interseksionalitas Patriarki Re-integrasi Sosial	Upaya untuk melihat perempuan (dan anak) sebagai kelompok minoritas dalam sistem patriarki masih memegang kekuasaan besar. Dalam konteks interseksionalitas, berbicara tentang perbedaan dalam pengalaman perempuan terutama dalam masyarakat multikultur. Tulisan ini merupakan gagasan pemikiran mengenai pentingnya analisis interseksionalitas dalam kajian gender sebagai reintegrasi sosial nilai dan norma dalam masyarakat Indonesia. Pengalaman dan suara perempuan merupakan politik identitas yang tidak boleh diabaikan. Banyaknya masalah sosial yang masih menjadikan perempuan sebagai objek budaya, merupakan interseksionalitas di Indonesia yang menjadi sumber diskriminasi sosial. Pentingnya representasi perempuan menjadi kunci utama dalam penentu re-integrasi sosial di Indonesia, yang masih sangat lekat dengan patriarki sebagai budaya. Feminisme menjadi alternatif penting dalam memahami interseksionalitas dan mengupayakan solusi atas diskriminasi yang inklusif di Indonesia.
Naskah Awal	29 Juni 2022
Review Pertama	02 Juli 2022
Revisi Akhir	07 Juli 2022
Diterima	09 Juli 2022
Publish	10 Juli 2022



ISSN 2685-483X

Volume 4, Issue 1, Januari-Juni 2022

Pages 48-55



Understanding Intersectionality in Indonesian Diversity: A Study in Sociology of Gender

Anggaunitakiranantika ^{*a, b}

Departemen Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Department of Women Studies, Ewha Woman's University, South Korea

Keywords	Abstract
Discrimination Intersectionality Patriarchy Social Reintegration	Attempting to see Indonesian women (and children) as a minority group in a patriarchal system still holds great power. In the context of intersectionality, it talks about the differences in women's experiences, especially in multicultural societies. This paper is about the importance of intersectionality analysis in gender studies as a social reintegration of values and norms in Indonesian society. Women's experiences and voices are identity politics that should not be ignored. The number of social problems that still make women cultural objects is intersectionality in Indonesia, a source of social discrimination. The importance of women's representation is the main key in determining social reintegration in Indonesia, which is still very closely related to patriarchy as a culture. Feminism is an important alternative in understanding intersectionality and seeking inclusive solutions to discrimination in Indonesia.
Submission	June 29, 2022
Initial Review	July 2, 2022
Final Revision	July 7, 2022
Accepted	July 9, 2022
Publish	July 10, 2022

Pendahuluan

Interseksionalitas dan Keberagaman Indonesia

Keberagaman yang terjadi pada masyarakat multikultural, seperti halnya yang terjadi di Indonesia, dalam analisis gender bersumber dari budaya patriarki yakni diartikan sebagai sebuah sistem yang menganggap laki-laki dan perempuan berada dalam relasi dominasi-subordinasi (Beauvoir, 2003; Tong, 2010). Dalam hal ini, yang menduduki posisi dominasi adalah laki-laki dan perempuan menduduki posisi subordinasi. Dengan adanya relasi tersebut menyebabkan adanya ketidakadilan gender yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam sistem patriarki, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, perempuan hidup dalam situasi yang lekat dengan penindasan dalam kehidupan yang beragam dan berbeda sebagai fenomena makroskopis. Dalam sistem patriarki, struktur sosial terdiri dari batasan dan hambatan yang terstruktur, beberapa perubahan mungkin terjadi, dan yang lainnya tidak. Sebagai sebuah penindasan, banyak larangan dan batasan bagi perempuan yang diinternalisasikan dan dikendalikan sendiri oleh tuntutan dan harapan yang dipaksakan oleh kebutuhan, selera, dan tirani sebagai akar dari budaya patriarki (Frye, 2019).

Dari cabaran patriarki, analisis gender memiliki peranan penting tentang bagaimana interseksionalitas bekerja dalam budaya. Perubahan harus dilakukan dari keluarga, seperti yang dijelaskan Collins (1991), hal-hal politik pada interseksionalitas kuat dalam mengendalikan masyarakat melalui keluarga. Entah bagaimana, itu menciptakan dimensi baru konflik gender, ras, dan bangsa, membuat penindasan perempuan melalui sistem patriarki tak terelakkan. Pembahasan mengenai interseksionalitas, dalam kajian gender dapat dikategorikan sebagai diskriminasi dan penindasan ganda dalam lapisan diskriminasi. Hal ini menciptakan perempuan dalam posisi mereka yang harus menjauh dari politik dan identitas mereka dengan menjadi perempuan yang terklasifikasi atas dasar tertentu. Di Indonesia, dengan keberagaman yang meliputi suku bangsa dan ras yang ada, maka warna kulit penduduk Indonesia dapat dipastikan tidak seragam. Terjadinya diskriminasi sangat rentan dengan kondisi ini, mengingat heterogenitas yang tinggi sering kali menjadi dasar perbedaan dan konflik kepentingan antar ras, suku bangsa dan golongan. Konsep interseksionalitas di Indonesia menjadi sangat penting dipahami mengingat keberagaman seharusnya menjadi penciri budaya Indonesia dengan keunikan dan kekhasan dari budaya lainnya, bukan menjadi sebuah kepentingan atau hal mendasar yang mengerucut pada sebuah konflik.

Konsep interseksionalitas yang berkembang di Amerika, melalui pemikiran Crenshaw (1989), awalnya hanya mengidentifikasi mengenai perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan dalam berbagai tatanan sosial dan lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti warna kulit dan stigma sosial yang berkembang. Namun, kemudian berkembang dengan pemikiran lain, seperti Nash (2008) yang menyatakan bahwa interseksionalitas ditemukan dalam konteks yang lebih luas menjadi perbedaan atas agama, kewarganegaraan, suku bangsa dan ras juga merupakan penanda politis atas identitas perempuan dan menjadi sumber diskriminasi. Konsep ini sangat penting dan menarik untuk digunakan dalam mencermati masyarakat. Dengan memperhatikan latar belakang geografis, sosial-budaya dan politis yang ada di Indonesia maka terdapat kesinambungan mengenai pemahaman stigma sosial yang berkembang lebih dalam di Indonesia, terutama terkait dengan anti diskriminasi pada perempuan.

Dalam sudut pandang feminis, memosisikan perempuan pada tatanan struktural dan hierarki yang melekat dalam lapisan sosial harus mempertimbangkan pemikiran tentang proses pembuatan makna (*meaning making process*) sebagai perempuan. Hal ini masih sering kali terabaikan dalam analisis sosial ataupun dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Menjadi perempuan Indonesia, terikat pada akar budaya patriarkal yang melekat kuat melalui kebudayaan dan tradisi. Perempuan sering kali menjadi objek, bahkan komoditi budaya dalam berbagai tradisi, dengan tujuan untuk kelestarian dan kesinambungan kebudayaan di masa depan. Terjadinya pelecehan seksual, kekerasan pada anak dan perempuan, perkawinan anak, sunat perempuan (*Female Genital Mutilation*), hadirnya

pekerja anak, hingga *human trafficking* di Indonesia adalah cerminan diri untuk mulai memikirkan pentingnya kehadiran dan makna (anak) perempuan sebagai aktor dalam menentukan posisi dirinya dalam masyarakat. Dalam hal ini, perempuan harus memiliki representasi dan tampil dalam hierarki sosial, bukan sebagai objek namun juga sebagai penentu bagaimana peran perempuan selanjutnya. Karena bagaimanapun, pengalaman perempuan dalam menjalankan tradisi dalam kebudayaan sebagai implementasi norma sosial bisa jadi berbeda dari yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya, atau oleh laki-laki yang biasanya di Indonesia lekat sebagai pengambil keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

Kontestasi kekuasaan yang melekat melalui budaya patriarki, dihadirkan melalui lapisan sosial cenderung menafikan keberadaan, kepentingan serta suara anak dan perempuan yang juga merupakan bagian dari masyarakat di Indonesia. Tanpa disadari kekuasaan beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Meminjam terminologi Foucault, kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan (Roderick, 1995; Tong, 2010). Pengambilan keputusan yang sering kali dilakukan oleh perempuan juga sering kali menjadi dasar konflik sosial (Khotimah dan Kiranantika, 2019), mengingat suara laki-laki adalah mutlak sebagai suara penguasa yang wajib diterima sebagai norma sosial di Indonesia. Permasalahan sosial yang sangat melekat kuat karena sistem patriarki adalah kemiskinan yang juga melekat pada perempuan, terlebih mereka adalah penduduk non-urban, memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga partisipasi dan aksesibilitas dalam menjangkau pekerjaan yang layak bagi diri dan keluarganya sangatlah minim. Dalam beberapa kasus, kondisi kemiskinan mengharuskan perempuan berperan ganda, yakni selain sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pekerja untuk membantu suami mencari nafkah untuk penghidupan yang layak. Namun, dalam masyarakat Indonesia, peran ganda perempuan masih dianggap biasa dan bukan sesuatu yang aneh. Apabila dikaji lebih dalam beban dan tanggung jawab perempuan lebih berat. Keterpurukan perempuan tersebut juga mengakibatkan kualitas kehidupan perempuan sulit untuk menjadi sejahtera, dengan bekerja di tempat-tempat dengan upah yang rendah.

Ketidakadilan dalam budaya patriarki inilah yang kemudian menjadikan konstruksi sosial terus berjalan di Indonesia hingga hari ini. Keadilan dan diskriminasi masih sangat dimungkinkan untuk terjadi dalam masyarakat Indonesia, seolah merupakan hal yang biasa dan dinormalisasi dengan berbagai permasalahan sosial yang tidak hanya melibatkan dikotomi antara laki-laki perempuan, anak dewasa, tua muda saja. Lebih jauh, ketidakadilan dan/atau ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini dapat dipahami terjadi dengan lintas ras, etnis/ suku bangsa, agama dan kepercayaan, latar belakang budaya, dengan identitas yang berbeda mengingat keberagaman yang terjadi di Indonesia. Berbagai ketimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan di dalam masyarakat Indonesia saat ini masih belum mencapai kesetaraan. Hal ini juga ditandai dengan munculnya Islamophobia, munculnya golongan kelas sosial yang juga melibatkan perempuan sendiri dalam interaksi sosial di masyarakat (seperti komunitas arisan, perkumpulan sosialita, aliansi perempuan). Kelas sosial yang muncul dewasa ini di Indonesia, juga ditandai oleh perempuan selaku aktor elite sosial yang ingin dianggap berbeda dari perempuan lainnya, dari kelas sosial bawah menuju masyarakat kelas menengah atas. Hal ini menjadikan dinamika keberagaman di Indonesia terus diwarnai dengan berbagai fenomena sosial yang menarik untuk dikaji.

Tak jarang, yang menjadi pencetus terjadinya konflik tersebut disebabkan karena perbedaan agama, persepsi, asal domisili dan tempat tinggal, tingkat pendidikan dan status ekonomi. Dengan adanya permasalahan sosial yang beragam, maka konsep interseksionalitas yang awal mulanya hanya didasarkan pada penentuan perempuan berdasar politik identitas atas ras dan gender (Crenshaw, 1989; Collins, 1991) di Amerika Serikat, dapat digunakan lebih luas lagi untuk menganalisis masyarakat Indonesia dalam perspektif feminis. Dinamika keberagaman yang terjadi di Indonesia, jika dianalisis lebih lanjut lebih sesuai dengan

pemikiran Nash (2008) yang menekankan pada titik perbedaan identitas yang terjadi dalam masyarakat multikultural, seperti yang tidak hanya terjadi di Amerika tetapi juga dapat diimplementasikan pada kebudayaan masyarakat lainnya.

Kajian Literatur

Interseksionalitas dalam Pemahaman Gender

Interseksionalitas berasal dari jalan panjang sejarah perempuan. Gagasan mengenai interseksionalitas dalam sosiologi bermula dari Amerika pada tahun 1989. Dengan menggunakan perspektif gender, interseksionalitas dipahami dari konteks tatanan masyarakat yang beragam, multikultur dan terstratifikasi atas kepentingan berdasarkan gender dan kelas. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya diskriminasi pada kelompok dan golongan tertentu, yang menjadi minoritas dalam masyarakat, utamanya pada perempuan, melekat melalui stigma sosial.

Interseksionalitas, berasal dari pemikiran Crenshaw (1989), seorang Profesor Hukum yang memperjuangkan diskriminasi yang dialami oleh perempuan sebagai subjek dari kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Pemikiran Crenshaw (1989) menitikberatkan pada perbandingan perlakuan tidak adil terhadap wanita kulit berwarna dengan perlakuan terhadap wanita kulit putih dalam berbagai skenario. Perempuan kulit berwarna tidak hanya menghadapi diskriminasi karena seksisme tetapi juga mengalami rasisme di Amerika. Menghadapi keduanya menjadikannya persimpangan yang sulit bagi banyak wanita kulit berwarna. Ketika feminis mengorganisir sekitar kategori “perempuan,” Crenshaw mengkritik subordinasi perempuan dan bekerja untuk memberdayakan perempuan. Gerakan hak-hak sipil, dengan memolitisasi ras, cenderung mengabaikan bagaimana gender juga mempengaruhi pengalaman penindasan dalam masyarakat Amerika. Demikian pula, feminis cenderung mengabaikan bagaimana rasisme mempengaruhi kehidupan perempuan kulit berwarna. Inilah yang ingin diubah Crenshaw dalam artikelnya. Ia ingin melihat bagaimana “dimensi” identitas yang berbeda bersinggungan atau saling mempengaruhi. Seorang wanita kulit berwarna mengalami rasisme dan seksisme, misalnya; pendekatan “persimpangan” karena itu harus menganalisis pengalamannya dari dimensi ras maupun jenis kelamin, bukan hanya satu atau yang lain.

Collins (1991) juga menitikberatkan pada konteks yang berfokus pada perempuan di Amerika. Lebih jauh, Collins mengonstruksi interseksionalitas, tetapi tidak mengartikulasikan dengan baik dalam interseksionalitas yang berbasis pada keluarga. Melalui negara, keluarga dibangun dan dibentuk dengan konsep reproduksi dalam masyarakat sebagai analisis independen dan menggambarkan seluruh masyarakat dalam negara hukum. Di sisi lain, Collins menjelaskan bahwa keluarga akan membenarkan hierarki yang berbeda, terutama jenis kelamin dan ras. Citra keluarga tertentu digunakan untuk menggambarkan bangsa dan menentukan kebijakan. Hal ini membawa kita melalui serangkaian cara dimana teorinya mengungkapkan interaksi antara “nilai-nilai keluarga” hierarkis dan ikatan nasionalisme yang ditekankan secara imperatif. Bagi Collins, analisis interseksional akan menggabungkan studi etnisitas dan agama lebih dekat dengan persilangan gender, ras, kelas, dan bangsa. Demikian pula, karena terkait erat dengan identitas gender dan masalah reproduksi, seksualitas tetap penting dalam konstruksi keluarga, dan keluarga yang sebenarnya tetap sangat terlibat dalam mereproduksi heteroseksisme. Oleh karena itu, Collins (1991) menggambarkan “individu biasanya mempelajari tempat mereka ditugaskan dalam hierarki ras, jenis kelamin, etnis, seksualitas, bangsa, dan kelas sosial dalam keluarga asal mereka. Pada saat yang sama, mereka belajar untuk melihat hierarki seperti itu sebagai pengaturan sosial alami dibandingkan dengan yang dibangun secara sosial. Hierarki dalam pengertian ini menjadi ‘dinaturalisasi’ karena dikaitkan dengan proses yang tampaknya ‘alami.’” Dengan demikian, menggunakan konsep digambarkan dalam keluarga ideal, ketimpangan sosial melalui isu interseksionalitas akan lebih luas, dan keluarga bersifat politis dengan kekuatannya yang melekat di masyarakat. Penegasan mengenai Interseksionalitas juga ditekankan oleh Nash (2008) yang memiliki argumen bahwa interseksionalitas membebaskan kita dari upaya untuk menemukan “asal” penindasan, dan itu bisa menjadi pekerjaan untuk melihat proses di mana penindasan

dan hak istimewa dibentuk, berdasarkan ras dan kelas sosial. Seperti yang dikemukakan Nash, sejarah interseksionalitas hanya terfokus pada ras dan gender. Perempuan kulit hitam sebagai fokus pembicaraan “ras-dan-gender” dalam wacana feminis dan anti-rasis, interseksionalitas menambahkan “nilai teoretis” kepada perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan. Interseksionalitas ada di mana-mana dalam studi wanita kontemporer. Namun, idenya adalah bahwa orang mendiami berbagai posisi dan identitas sosial (ras, kelas, jenis kelamin, kebangsaan, seksualitas, agama) secara bersamaan dan bersinggungan. Ini adalah alat analisis yang digunakan pada studi gender yang dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu yang berusaha menggambarkan interaksi berbagai penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang memengaruhi orang-orang yang menempati berbagai identitas. Landasan Nash untuk “memikirkan kembali interseksionalitas” muncul sebagai “pengetahuan orang luar.” Nash menyatakan bahwa “sementara beberapa cendekiawan feminis bersikeras bahwa interseksionalitas mengacu pada semua posisi subjek, sebagian besar keilmuan interseksional berpusat pada subjek tertentu yang terpinggirkan.” Terakhir, Nash mengajukan pertanyaan ‘Jadi Apa’ yang, pada intinya, merinci proses menghuni identitas titik-temu dan kegagalan titik-temu sebagai sebuah teori.

Berdasarkan Riley (2003), istilah ‘perempuan’ dikonstruksi secara historis, diskursif, dan dikategorikan. ‘Perempuan’ adalah kolektivitas yang mudah berubah di mana posisi dapat ditundukkan dan dicirikan tanpa makna. Dalam klaim interseksionalitas, bukan hanya ada banyak jenis perempuan tetapi ‘perempuan’ tidak secara permanen menghuni kategori itu sendiri. Ini berbicara tentang keasyikan politik, tidak hanya karena argumen substantif tentang menentukan ‘kebutuhan’ perempuan tetapi juga untuk pemikiran feminis dan empirisme baru untuk penulisan sejarah. Pentingnya interseksionalitas, menurut perspektif Riley (2003), oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui keragaman perempuan (sedangkan mereka telah dibagi oleh hambatan kelas, ras, etnis, agama, dan ideologis) daripada mendefinisikan kategori “perempuan” oleh mengacu pada biologis dan kategori sex.

Menggunakan perspektif interseksionalitas, menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam melakukan analisis melalui kajian gender dalam masyarakat Indonesia yang memiliki dimensi sosial dan kultural sangat beragam dengan menitikberatkan pada sudut pandang gender, anti rasis dan anti-diskriminasi.

Penutup

Interseksionalitas sebagai konsep Re-integrasi Sosial

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia masih banyak ditemui kejadian atau fenomena yang tidak menggambarkan kesetaraan gender sekalipun mulai ada perwujudan regulasi tersebut. Perilaku diskriminasi masih banyak ditemui dalam hubungan sosial masyarakat yang menyudutkan salah satu pihak, yakni perempuan, dan anak sebagai grup komunal yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini muncul karena penerimaan pembuat regulasi masih belum sepenuhnya memahami pentingnya interseksionalitas sebagai konsekuensi dari masyarakat multikultural di Indonesia. Terlebih, masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa adanya perbedaan sudut pandang, pemikiran dan berbagai stigma sosial merupakan kewajaran atas perbedaan dikotomi antara jenis kelamin, laki-perempuan.

Konteks interseksionalitas dapat menjadi pisau analisis dari keberagaman ini. Munculnya politik identitas dari konstruksi sosial atas gender yang terbentuk melalui patriarkal sistem menjadi pijakan kuat bagi feminis dalam membaca interseksionalitas dalam keberagaman Indonesia sebagai upaya mendekonstruksi nilai dan norma sosial dengan menguatkan posisi perempuan dalam konteks relasi sosial-budaya di masyarakat. Mengacu pada tujuan SDGs nomor 5, mengenai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan memberikan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sebagai pemenuhan pada Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh anak, termasuk yang didungungkan melalui konsep 3-ENDS untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan ekonomi (Kiranantika, A., *et.al.* 2018).

Sejatinya, konsep interseksionalitas dapat digunakan untuk melakukan reintegrasi sosial, yakni sebuah proses memperbaiki nilai-norma sosial untuk adaptasi dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan (Soekanto, 2006).

Dalam mengimplementasikan interseksionalitas, penting untuk menyimak pemikiran Bourdieu mengenai habitus, yakni struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Individu menggunakan habitus untuk berhubungan dengan realitas sosial yang digunakan untuk memersepsi, memahami, dan mengevaluasi dunia sosial. Seperti konsepsi tentang benar-salah, baik-buruk, berguna-tidak berguna, terhormat-terhina (Adib, 2012). Adapun *field* merupakan jaringan relasional antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individual. Oleh karena itu, ranah menjadi semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu (Ritzer dan Goodman, 2010). Praksis dari kerangka konseptual Bourdieu ini memiliki relevansi untuk menjelaskan fenomena harmoni sosial yang terbentuk pada masyarakat. Interseksionalitas yang terjadi dan terangkum melalui keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman dapat digunakan sebagai upaya dekonstruksi sosial pada penerimaan perempuan melalui budaya patriarki. Pemaknaan perempuan (dan anak) yang lekat akan subjek atas diskriminasi dan juga komodifikasi dari berbagai kepentingan sangat penting untuk terus diperhatikan untuk mengikis 'hak istimewa' dalam patriarki. Banyaknya kesulitan dan bahaya yang harus dihadapi seputar keberagaman budaya dan kesejajaran relasi sosial antara Laki-Perempuan menjadi wacana penting yang penting direfleksikan dalam melakukan re-integrasi sosial nilai dan norma sosial. Hal ini disebabkan karena rasisme, seksisme, dan heteroseksisme itu tidak sama, permasalahan sosial yang ditimbulkan atasnya tidak boleh dianggap sama. Untuk melakukan reintegrasi dalam sistem sosial, pertama-tama kita harus mengenali dimensi besar "hak istimewa" atau *privilege* yang seolah tak terlihat dan dianggap biasa dalam masyarakat. Mengembangkan wacana kritis, dengan selalu mempertanyakan dan merepresentasikan peran sosial perempuan dan anak adalah cara untuk melakukan penolakan 'hak istimewa' atau *privilege* yang menjadi alat politik utama untuk memperbaiki struktur sosial. Refleksi pada kesetaraan atau keadilan yang tidak pincang, tidak setara, adanya keuntungan yang tidak diterima, hubungan kekuasaan dan dominasi yang diberikan pada sistem patriarki adalah cara untuk membungkam perempuan dan melekatkan pada struktur sosial yang terbentuk di masyarakat.

Posisi perempuan dalam keberagaman di Indonesia masih belum strategis dan membutuhkan perjuangan yang Panjang untuk mencapai inklusivitas sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. Selama masih terdapat politisasi atas identitas pada perempuan (dan anak) dalam kehidupan sosial dan budaya melalui sistem patriarki, maka perjuangan perempuan wajib didengungkan, solidaritas perempuan wajib dilakukan secara masif dan peningkatan kapabilitas pengetahuan perempuan wajib ditingkatkan melalui berbagai media (baik media konvensional seperti televisi, radio, surat kabar atau melalui media modern seperti media sosial dan internet). Sangat penting untuk memikirkan dan menentukan interseksionalitas pada solidaritas dan gerakan 'persaudaraan' di masa depan, terutama bagi gerakan perempuan di Indonesia. Dari pengalaman perempuan, gagasan mengenai interseksionalitas dan identitas ganda harus diperiksa untuk memperluas, memperkaya, dan mereformasi. Semua gerakan titik-temu harus terspesialisasi dan karena itu bersifat sementara dan tidak lengkap. Hal ini harus dipahami sebagai analisis atau formasi interseksional selalu merupakan *work-in-progress*, yang berfungsi sebagai agensi perempuan untuk bergerak dan memunculkan ragam identitas dalam masyarakat multikultural dalam konteks sosial dan formasi kelompok lainnya.

Perubahan tidak perlu dilakukan secara menyeluruh, namun wajib melibatkan perempuan di segala sektor kehidupan dengan berperan pada sektor sosial, ekonomi dan politik, karena sejatinya, organ biologis-reproduksi yang dimiliki perempuan bukanlah sebuah penghalang dalam peran perempuan di masyarakat (Umar, 1999). Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tatanan sosial dalam masyarakat, namun lebih melihat kepada disfungsi peran perempuan dalam ranah publik dan domestik. Dalam konteks interseksionalitas, perubahan sosial melalui re-integrasi sosial wajib mempertimbangkan keberagaman sebagai identitas ganda sebagai masyarakat multikultur dalam merepresentasikan individu. Lebih lanjut,

pentingnya keadilan yang harus diciptakan dalam kesetaraan gender adalah mengenai penekanan pada sejumlah aspek yang juga penting untuk mendapatkan perhatian secara serius yang terkait dengan keterbukaan akses, partisipasi dan kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan anak. Aspek-aspek tersebut penting bagi siapa saja, baik laki ataupun perempuan untuk mengisi kebutuhan dan menjaga komitmen dalam sektor publik dan domestik. Adapun beberapa aspek yang dimaksud adalah menerima perbedaan prioritas dari masing-masing individu dan mengintegrasikan kepentingan (Rapoport, *et. al*, 2002).

Meskipun sistem patriarki tampak seperti tembok besar dan langit-langit kaca bagi perempuan, anak dan kelompok minoritas lainnya, feminis memperbesar inklusi sosial dengan menyuarakan apa yang menjadi hak mereka, gerakan sosial yang tidak pernah berakhir dan memberdayakan perempuan untuk melawan diskriminasi. Jadi, bukan untuk menjadi polisi moral alasan feminisme harus ada, tetapi demi kemanusiaan, kesetaraan gender dan keberlanjutan hak asasi manusia. Interseksionalitas di Indonesia, wajib menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan publik yang dapat meng-cover seluruh permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat termasuk representasi budaya yang inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adib, M. (2012). *Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu*. Jurnal BioKultur, 1(2), 91-110.
- Beauvoir, de S. (2003). *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Jakarta: Pustaka Prometheus
- Collins, P. H. (1998). It's all in the family: Intersections of gender, race, and nation. *Hypatia*, 13(3), 62-82.
- Crenshaw, K. (2018). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics [1989]. In *Feminist legal theory* (pp. 57-80). Routledge: New York.
- Frye, M. (2019). Oppression. In *Ideals and Ideologies* (pp. 411-419). Routledge.
- Khotimah, H., & Kiranantika, A. (2019). Bekerja dalam Rentangan Waktu: Geliat Perempuan pada Home Industri Keramik Dinoyo. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(2), 106-116.
- Kiranantika, A., Natalia, R., & Kumala, M. R. (2018). Sosialisasi 3-Ends Pada Anak Dan Remaja Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 1-9.
- Martin, R. (1995). *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Nash, J. C. (2008). Re-thinking intersectionality. *Feminist review*, 89(1), 1-15.
- Rapoport, Rhona. Bailyn, Lotte. Fletcher, Joyce K and Pruitt, Bettye H. 2002. *Beyond Work-Family Balance*, Jossey Bass: San Francisco
- Riley, D. (1988). *'Am I that name?': Feminism and the category of 'women in history? USA*: University of Minnesota Press
- Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2010). *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Tong, R.P. (2010). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina